

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan negara adalah pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam mencapai tujuannya, pemerintah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terus melaksanakan pembangunan di segala bidang. Alat ukur keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi anatara lain adalah: peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran yang rendah dan neraca pembayaran yang sehat (Novitaningrum, 2011).

Setiap Negara pasti mempunyai tujuan dalam pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup riil per kapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas (Irawan dan Suparmoko, 2002). Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat yang lebih rendah seperti Provinsi atau Kabupaten/Kota. Secara umum pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata (Haryanto, 2013). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang diproduksi dalam

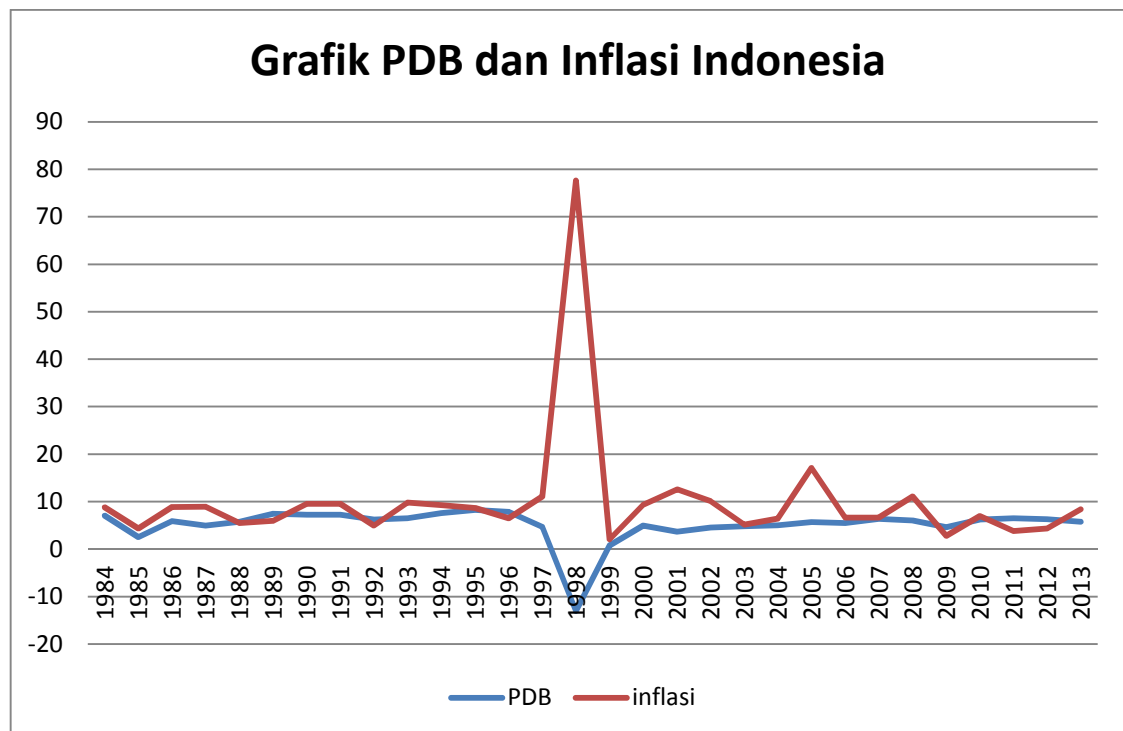
masyarakat bertambah atau terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto/*gross domestic product* (GDP) (sukirno, 2004).

Krisis finansial global pada tahun 2008 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan diikuti dengan menurunnya volume perdagangan global pada tahun 2009. Hal ini akan berdampak pada penurunan kapasitas produksi yang bisa memicu lonjakan pengangguran. Pada saat krisis ekonomi, *agregat demand* yang menurun menyebabkan industri menurunkan tingkat output. Menurut (Muharman dan Maski, 2013), turunnya output perusahaan membawa perusahaan ke dalam kerugian, sehingga untuk mengurangi beban biaya perusahaan melakukan perampingan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan timbulnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan dan selanjutnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang akan mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Krisis tersebut menjadi momentum dalam meningkatkan ketahanan ekonomi juga menjadi pembelajaran pada pemerintah Indonesia dalam menempuh kebijakan fiskal dan moneter yang efisien dan efektif. Dalam model makroekonomi Keynes, faktor paling penting dalam menentukan tingkat permintaan agregat (AD) adalah kebijakan fiskal, sedangkan kebijakan moneter menurut Keynes pengaruhnya terhadap permintaan agregat adalah lemah (Nanga, 2005).

Kebijakan fiskal merupakan alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus

memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Sedangkan menurut Masri (2010) kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan meningkatkan output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Untuk mengetahui perkembangan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1 dengan PDB sebagai ukuran dari pertumbuhan ekonomi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1. Perkembangan PDB menurut harga konstan dan Inflasi di Indonesia dari tahun 1984 – 2013 (dalam milyar rupiah).

Gambar 1 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia selama periode 1984 sampai 2013. Pertumbuhan ekonomi Indonesia

pada beberapa tahun menunjukkan peningkatan dan pada tahun-tahun lainnya mengalami penurunan. Dari grafik di atas dapat dideskripsikan bahwa pertumbuhan ekonomi paling rendah dan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat itu adalah -13,1 persen serta angka inflasi mencapai 77,63 persen. Pada tahun tersebut menjadi pertumbuhan terendah yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Setelah tahun tersebut, laju inflasi di Indonesia tidak begitu besar peningkatan atau penurunannya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sudah mulai terjadi pada tahun 1997 dimana pertumbuhan ekonomi saat itu sebesar 4,65 persen dan inflasi sebesar 11,05 persen. Kemudian pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun lebih besar lagi akibat adanya krisis ekonomi, yaitu turun sampai 8,45 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 1999 perekonomian Indonesia mulai membaik, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil naik 12,51 persen dari pertumbuhan tahun 1998.

Pada periode pemulihan setelah krisis ekonomi (2000-2007) pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali naik. Pada tahun 2008 perekonomian dunia diguncangkan dengan adanya krisis global, namun adanya krisis global ini ternyata tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami penurunan yang cukup berarti seperti saat periode krisis ekonomi, pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,01 persen dan inflasi 11,06 persen, turun 0,34 persen dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2007. Pada tahun 2010 kondisi perekonomian kembali menunjukkan kondisi yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 tumbuh 6,20 persen dan angka ini terus meningkat

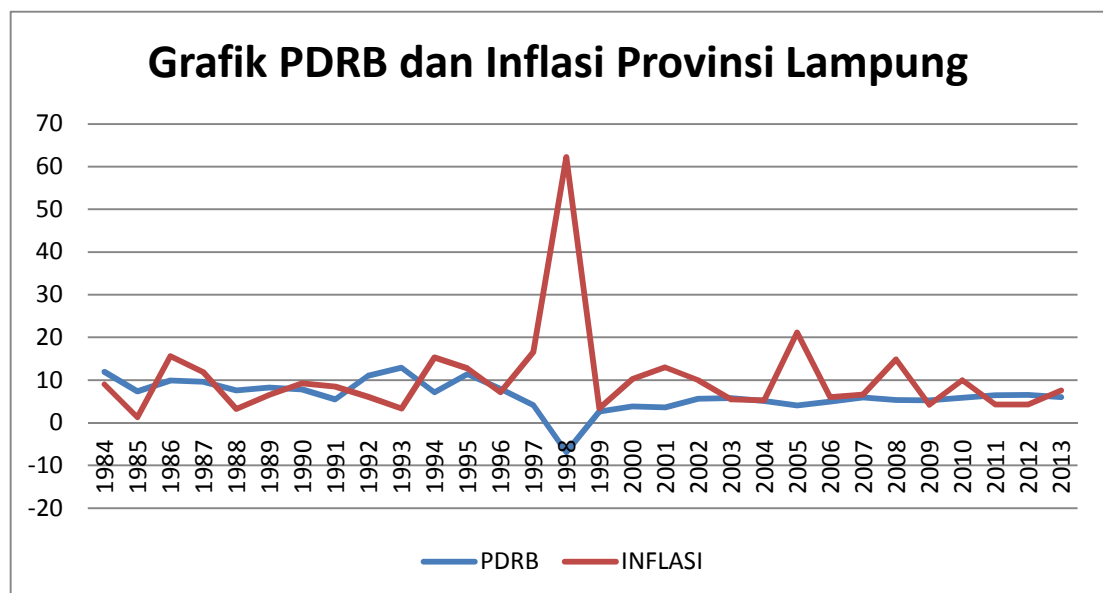
sampai tahun 2013. Dari grafik di atas terlihat bahwa baik laju inflasi maupun laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 30 tahun, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2013 telah mengalami perubahan secara berfluktuatif.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan dalam melihat kondisi perekonomian baik nasional maupun regional. Inflasi salah satu fundamental ekonomi penting dalam perekonomian yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Kestabilan harga harus tercapai untuk menghindari dampak buruk dari inflasi yang tinggi (Izzah, 2012).

Terlihat jelas bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi dan juga menjadi salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi dalam suatu negara, sehingga apabila terjadi guncangan ekonomi yang mengakibatkan perlambatan perekonomian maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Kebijakan fiskal diarahkan pemerintah untuk stabilisasi perekonomian melalui pengendalian pengeluaran atau belanja pemerintah dan dari sumber penerimaan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal menggunakan instrumen pengeluaran pemerintah dan pajak. Sebagai salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai berbagai sasaran

pembangunan. Melalui instrumen pengeluaran pemerintah dan pajak, pemerintah dapat mempengaruhi harga dalam pasar karena permintaan secara agregat akan terpengaruh (Surjaningsih, Utari dan Trisnanto, 2012).

Dampak adanya krisis global sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan inflasi di daerah. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, kestabilan harga baik nasional ataupun regional belum tercapai sepenuhnya. Hal ini terlihat dari pencapaian inflasi tahunan (*year on year*) yang masih cenderung tinggi dan tidak stabil. Sejak tahun 1999, mulai dilakukan perbaikan kondisi perekonomian nasional yang membawa perbaikan pada kondisi perekonomian daerah. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan tingkat inflasi tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah, sehingga dapat menggambarkan ketidak stabilan harga ditingkat regional. Pencapaian laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Gambar 2. Perkembangan PDRB dan Inflasi di Provinsi Lampung Tahun 1984 – 2013 (dalam jutaan rupiah).

Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Provinsi Lampung dari tahun 1984- 2013. Berdasarkan kondisi perekonomian Lampung selama tahun tersebut, terlihat bahwa inflasi tahunan Lampung masih cenderung tinggi. Selama periode 1984– 2013 rata-rata tingkat inflasi tahunan di Lampung mencapai rata-rata 8,6 persen per tahun. Pencapaian inflasi tertinggi di Provinsi Lampung juga terjadi pada tahun 1998, dengan angka mencapai 62,25 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar -6,59 persen. Tahun tersebut merupakan tahun terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang juga mengakibatkan tingginya tingkat inflasi regional daerah Lampung. Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung juga mengalami penurunan cukup besar yaitu sebesar 4,01 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat pada tahun 2001 dan inflasi meningkat kembali pada tahun 2005 akibat adanya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang berpengaruh pada kestabilan perekonomian di Daerah Lampung. Akibat masih tingginya inflasi tahunan, pertumbuhan ekonomi di Lampung juga cenderung lambat. Dalam suatu perekonomian, antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi saling berkaitan. Pencapaian inflasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Sebaliknya jika pencapaian inflasi relatif stabil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah Propinsi Lampung telah melakukan berbagai kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan upaya pencapaian stabilitas harga melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kedua kebijakan tersebut diharapkan memiliki koordinasi yang harmonis sehingga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat terwujud. Kestabilan harga dan

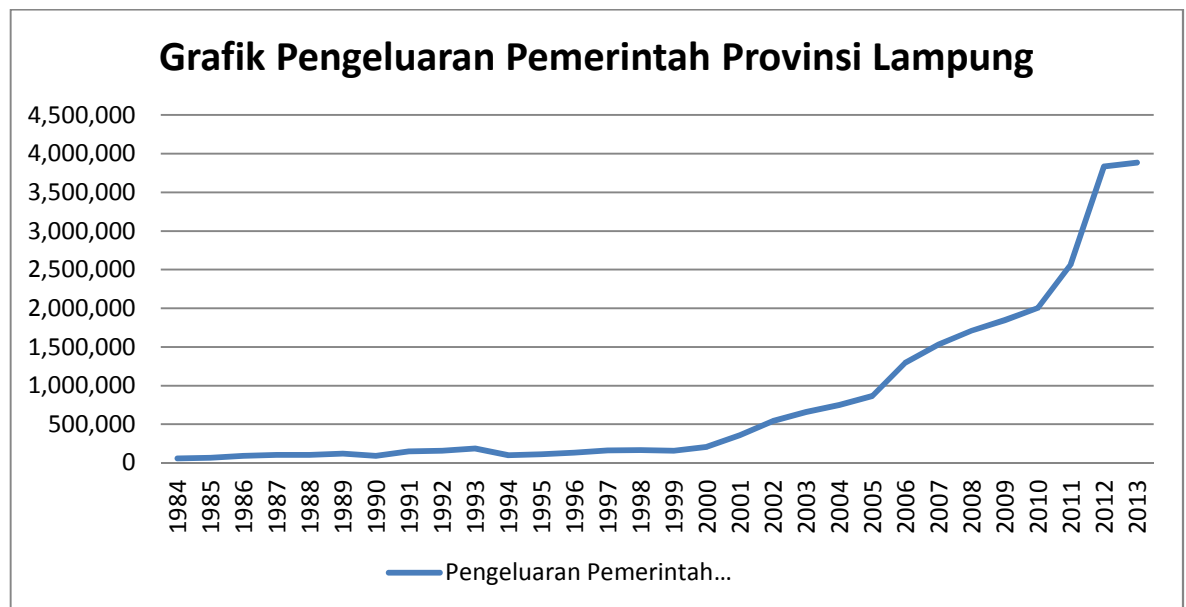
pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang tidak terlepas dari perubahan yang terjadi di daerah. Pada tingkat regional, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan stabilitas harga merupakan sasaran dari kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal nasional, tetapi juga sebagian dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan regional di bidang keuangan dan fiskal (anggaran). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan penekanan laju inflasi merupakan sasaran dari berbagai kebijakan pada tingkat nasional dan regional (Rahmawati, 2011).

Kebijakan fiskal memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi serta tingkat inflasi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi (Surjaningsih et al, 2012). Kebijakan fiskal merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok, yaitu perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) (Mankiw, 2003; Turnovsky, 1981). Lebih jauh Soediyono (1985) mengatakan bahwa variabel instrumen dari kebijakan fiskal dapat berupa pajak (*tax*), transfer pemerintah (*government transfer*), subsidi (*subsidies*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Secara umum, kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan ekonomi makro dari pemerintah di mana pencapaian sasarannya difokuskan pada barang-barang di dalam negeri (*domestic goods*), rumah tangga, ataupun perusahaan/swasta/pengusaha.

Wagner menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Wagner dalam Mahyuddin, 2009), dimana analogi untuk Hukum Wagner ini adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan akan penyediaan

barang publik juga akan meningkat sehingga dibutuhkan pembiayaan melalui penerimaan pemerintah yang pada akhirnya pengeluaran pemerintah juga akan meningkat atau dapat diartikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan mencerminkan besarnya dana pengeluaran pemerintah untuk membiayai kebutuhan layanan jasa pemerintah.

Namun Aliran Keynesian menggambarkan sebaliknya, bahwa dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa secara agregat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut (Gusti Ayu, Sukarsa dan Yuliarmi, 2014) Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dapat ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah di Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Gambar 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Lampung (Dalam ribuan rupiah) Tahun 1984 - 2013.

Gambar 3 menunjukkan pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung yang cenderung selalu meningkat setiap tahunnya. Selama periode penelitian, pengeluaran pemerintah sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1990 sebesar Rp. 91.604,907 dan tahun 1994 sebesar Rp. 97.979,717. Setelah tahun 1994 pengeluaran pemerintah di Provinsi Lampung meningkat kembali dan selalu mengalami peningkatan hingga tahun 2013.

Pengeluaran pemerintah daerah bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah, sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal. Perubahan positif belanja pemerintah dari tahun sebelumnya berarti pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan permintaan, sebaliknya perubahan negatif pengeluaran pemerintah daerah artinya pemerintah daerah melaksanakan kebijakan fiskal kontraktif akan menurunkan permintaan. Anggaran belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Masri, 2010).

Dalam model makroekonomi Keynes, anggaran pemerintah (*government budget*) merupakan bagian yang penting untuk mengatur permintaan agregat perekonomian. Jika perekonomian berada di bawah *full employment*, permintaan agregat dapat ditingkatkan dengan menambah pengeluaran pemerintah atau dengan menurunkan pajak (*tax*). Dalam pandangan Keynes, pemerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur permintaan agregat (AD) dalam rangka menjaga perekonomian agar selalu mendekati tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment level*). Golongan Keynesian beranggapan bahwa kebijakan fiskal juga dapat mempengaruhi tingkat harga, dengan mengatur

besaran belanja pemerintah dan penerimaan pajak akan mempengaruhi sisi permintaan total sehingga mengubah keseimbangan harga pasar. Sedangkan golongan monetaris beranggapan bahwa inflasi hanya dapat ditentukan oleh indikator-indikator makro seperti jumlah uang beredar, suku bunga maupun nilai tukar (Nanga, 2001).

Penelitian oleh Haque dan Montiel (1991), misalnya, menyimpulkan bahwa dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan menengah, justru bersifat kontraktif. Sedangkan penelitian oleh Haque, Montiel, dan Symansky (1991) menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah, walaupun pada awalnya mengakibatkan penurunan output, namun akan menaikkan output dan inflasi di periode selanjutnya. Sementara itu, Khan dan Knight (1981) menyimpulkan bahwa elastisitas pendapatan nominal dari pengeluaran pemerintah dan pajak adalah positif dan mendekati 1.

Selain dampak pengeluaran pemerintah terhadap output, aspek lain yang penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi countercyclical dari kebijakan fiskal (Surjaningsih, Utari, Trisnanto, 2012).



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Gambar 4. Penerimaan Pajak Provinsi Lampung (dalam ribuan rupiah) Tahun 1984 - 2013.

Gambar 4 menunjukkan besarnya penerimaan pajak di Provinsi Lampung dari tahun 1984 - 2013. Peran pajak sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di setiap daerah pada setiap negara. Penerimaan pajak di daerah Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan pajak daerah Lampung sempat mengalami penurunan pada tahun 1998 sebesar Rp. 33.212.242 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 50.595.201 dan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 725.464.224 dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 774.613.920. Pada tahun 2010 sampai dengan 2013 penerimaan pajak daerah di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah, kebijakan fiskal bebrbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan

jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variable-variabel makro. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh instrumen kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan inflasi di Provinsi Lampung. Sehingga dari penelitian tersebut penulis mengambil judul “ **Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDRB dan Inflasi di Provinsi Lampung** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, karena besarnya peranan kebijakan pemerintah di bidang fiskal baik pada kondisi sebelum krisis maupun setelah terjadinya krisis ekonomi, perlu dilakukan suatu penelitian :

- Apakah ada pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang instrumen fiskal pemerintah Provinsi Lampung terhadap PDRB dan inflasi di Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini antara lain :

- Untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang instrumen fiskal pemerintah Provinsi Lampung terhadap PDRB dan inflasi di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh instrumen fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan inflasi di Provinsi Lampung yang mengambil sampel penelitian dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2013.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lain yang sedang meneliti masalah yang sama dan analisis ini dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.

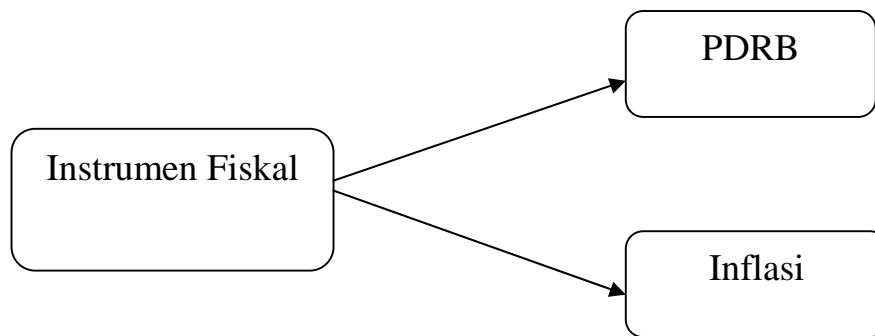
E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan perekonomian akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan dibidang fiskal, yaitu menyangkut pengeluaran pemerintah, dan juga kebijakan tentang pajak. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian (Ndari Surjaningsih, 2012).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak (tax), transfer, atau belanja pemerintah (government spending/purchase) yang ditujukan untuk mempengaruhi indikator-indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jhingan (2004) menyatakan bahwa kebijakan fiskal berarti menggunakan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi atau pembangunan. Dalam instrumen kebijakan di bidang fiskal, pengeluaran pemerintah merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dalam kajian ekonomi dapat berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. Oleh karena itu, aktivitas (pengeluaran) pemerintah baik langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap total output (Sodik, 2007).

Pembangunan di bidang ekonomi ini sangat penting karena dengan meningkatnya pembangunan di bidang ekonomi maka sektor-sektor yang lain akan meningkat pula seiring dengan peningkatan pada sektor ekonomi. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah mempunyai peranan penting karena pemerintah daerah yang lebih tahu akan potensi dan sumber daya baik manusia dan alam yang dimiliki oleh daerahnya sendiri (Eddy Wibowo, 2012). Setiap daerah dalam melaksanakan pembangunannya mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi akibat adanya pendapatan yang meningkat.

Dalam jangka panjang, perubahan PDRB akibat perubahan pengeluaran pemerintah daerah yakni sebesar $\Delta Y / \Delta G = 1/(1-b)$. Pengeluaran pemerintah daerah naik mendorong PDRB naik sehingga jumlah uang beredar naik, mempengaruhi pendapatan naik menyebabkan harga naik karena permintaan naik, sebaliknya pengeluaran pemerintah turun berdampak PDRB turun sehingga jumlah uang beredar turun, mempengaruhi pendapatan turun menyebabkan harga turun karena permintaan turun. Jangka pendek perubahan pengeluaran pemerintah daerah, langsung mempengaruhi pendapatan dan harga karena perubahan permintaan. Pengeluaran pemerintah naik, mempengaruhi pendapatan naik berdampak pada harga naik, karena permintaan naik, dan sebaliknya pengeluaran pemerintah turun, menyebabkan pendapatan turun dan mempengaruhi turunnya harga karena permintaan turun. Dari penjelasan diatas dapat dibuat kerangka pemikiran seperti di bawah ini:



F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab suatu permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji kebenarannya. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. Berikut hipotesis dari variabel Instrumen Fiskal terhadap PDRB dan Inflasi di Provinsi Lampung :

1. Diduga bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB dan dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap PDRB.
Diduga bahwa pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang, berpengaruh secara negatif terhadap PDRB.
2. Diduga bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap inflasi dan juga Pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang, berpengaruh secara positif terhadap inflasi.

1. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pikir, serta beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian tersebut.

BAB III Metode Penelitian memuat tentang metode pencarian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, beserta sumber data dan batasan variabel.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah di sediakan.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran